

Analisis Faktor Internal dan Eksternal dalam Konteks Ketahanan Demokrasi Indonesia

Afrilia Linra¹, Achmad Akmaluddin²
Universitas Bina Darma^{1,2}
Corresponding email: Afrilia.linra@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History Submission: Review: Revised: Accepted: Published:</p>	<p>Artikel ini membahas ketahanan Demokrasi Pancasila terhadap berbagai ancaman internal dan eksternal. Faktor internal mencakup korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran hoaks, radikalisme, intoleransi, lemahnya hukum, dan rendahnya partisipasi politik. Sementara itu, faktor eksternal meliputi intervensi asing, ketergantungan ekonomi, serta konflik perbatasan. Dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menyoroti bagaimana akumulasi ancaman tersebut dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi. Ditekankan pula pentingnya strategi penguatan, seperti pendidikan politik, penegakan hukum yang adil, literasi digital, dan keterlibatan generasi muda. Tujuannya adalah membangun ketahanan demokrasi yang responsif terhadap tantangan zaman.</p>
<p>Keywords Demokrasi Pancasila Ketahanan Demokrasi Ancaman Internal Ancaman eksternal Supremasi hukum Partisipasi Politik</p>	<p><i>This article explores the resilience of Pancasila Democracy against various internal and external threats. Internal factors include corruption, abuse of power, the spread of hoaxes, radicalism, intolerance, weak law enforcement, and low political participation. External threats involve foreign intervention, economic dependency, and territorial disputes. Using a literature study approach, the article highlights how these threats collectively undermine the core values of democracy. It also emphasizes the importance of strengthening strategies such as political education, fair law enforcement, digital literacy, and youth involvement in democratic processes. The goal is to build a resilient democratic system capable of responding to contemporary challenges.</i></p>

Introduction

Demokrasi merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem pemerintahan modern, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila, yakni bentuk demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Demokrasi Pancasila dipahami sebagai demokrasi yang bersumber pada sila-sila Pancasila serta dipandang sebagai suatu kesatuan yang integral dalam kehidupan bernegara (Maulana Siregar et al., 2024). Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik yang khas, seperti mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan menekankan persatuan dalam keberagaman. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis yang sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia, yang berdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Meskipun demikian, implementasi Demokrasi Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Perubahan sosial-politik di tingkat nasional maupun global membawa dampak signifikan yang tidak selalu positif terhadap ketahanan demokrasi di Indonesia. Faktor internal seperti korupsi yang sistemik, penyalahgunaan kekuasaan yang semakin marak di berbagai lini pemerintahan, serta rendahnya integritas dan transparansi dalam praktik politik menjadi ancaman serius yang menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, merebaknya fenomena penyebaran hoaks dan disinformasi melalui platform digital, radikalisme yang berkembang di kalangan masyarakat, intoleransi yang makin terasa dalam berbagai bentuk interaksi sosial, lemahnya supremasi hukum, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat secara umum turut memperlemah sendi-sendi kehidupan demokrasi.

Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga bersumber dari pengaruh eksternal. Intervensi politik asing yang sering kali dilakukan melalui berbagai saluran diplomatik maupun media, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap negara-negara lain, serta potensi konflik wilayah di perbatasan negara menjadi tantangan besar bagi stabilitas politik dan kedaulatan Indonesia. Ancaman ini dapat melemahkan posisi strategis Indonesia, sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan yang independen dan berdaulat, serta mengancam integritas demokrasi secara keseluruhan.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa Demokrasi Pancasila tengah berada dalam situasi yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Upaya untuk memperkuat ketahanan demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen formal negara, melainkan juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini disusun secara sistematis guna menganalisis secara kritis berbagai bentuk ancaman internal maupun eksternal yang memengaruhi kelangsungan Demokrasi Pancasila. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan ketahanan demokrasi melemah, sekaligus menawarkan pendekatan strategis yang dapat diterapkan secara efektif untuk memperkuat demokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan multidimensional.

Dengan metode penelitian berupa kajian literatur kualitatif yang mendalam, artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan kontribusi yang relevan bagi pengambilan kebijakan nasional. Penelitian ini merangkum berbagai teori, studi empiris, laporan institusi, serta analisis akademik mengenai demokrasi, partisipasi politik, radikalisme, supremasi hukum, dan dampak globalisasi terhadap kedaulatan negara. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas dalam upaya bersama memperkuat fondasi Demokrasi Pancasila, sehingga tetap kokoh menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan secara sistematis dan mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian yang bersifat eksploratif-deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan menggali dan memahami secara mendalam tentang berbagai faktor yang menjadi ancaman terhadap ketahanan Demokrasi Pancasila, baik dari aspek internal maupun eksternal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan institusional, dokumen pemerintah, serta artikel-artikel yang relevan dengan isu demokrasi, politik, dan keamanan nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi literatur yang relevan, seleksi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, serta dokumentasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen, publikasi akademik, artikel ilmiah, serta laporan resmi yang terkait dengan Demokrasi Pancasila dan berbagai bentuk ancaman terhadapnya, baik dalam konteks nasional maupun global. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sumber-sumber literatur berdasarkan relevansi yang tinggi terhadap tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, di mana data-data yang terkumpul diolah melalui tahap reduksi data (*penyaringan data yang relevan*), penyajian data (*penyusunan data secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*menarik interpretasi serta temuan yang menggambarkan ancaman terhadap ketahanan Demokrasi Pancasila*). Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teknik analisis komparatif untuk membandingkan

ancaman internal dan eksternal terhadap demokrasi sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai skala dan dampak dari masing-masing ancaman tersebut.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai berbagai tantangan yang dihadapi oleh Demokrasi Pancasila serta mampu menghasilkan rekomendasi yang praktis dan strategis bagi penguatan demokrasi di Indonesia secara berkelanjutan.

Results and Discussion

Demokrasi merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem pemerintahan modern, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, sistem demokrasi yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila, yakni bentuk demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Demokrasi Pancasila dipahami sebagai demokrasi yang bersumber pada sila-sila Pancasila serta dipandang sebagai suatu kesatuan yang integral dalam kehidupan bernegara (Maulana Siregar et al., 2024). Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik yang khas, seperti mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan menekankan persatuan dalam keberagaman. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang berdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, Demokrasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, memberikan dampak signifikan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, era digital dan globalisasi membawa kemajuan dalam kebebasan berekspresi serta keterbukaan informasi. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga melahirkan berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Ancaman tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari pengaruh eksternal yang dapat menggeser nilai-nilai asli Demokrasi Pancasila.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memahami dan mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap Demokrasi Pancasila. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga sistem demokrasi yang sehat dan mencegah munculnya berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi.

A. Macam-macam Bentuk Ancaman Terhadap Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal dan dapat melemahkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian ini secara khusus akan menjelaskan secara rinci berbagai macam ancaman tersebut dengan menguraikan secara jelas faktor-faktor utama yang dapat menghambat pelaksanaan Demokrasi Pancasila secara ideal di Indonesia.

1. Faktor Internal (Ancaman dalam Negeri)

Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri yang dapat menghambat keberlangsungannya. Faktor internal ini sering kali bersumber dari kelemahan dalam sistem pemerintahan, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta munculnya kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Jika tidak diatasi dengan baik, ancaman dari dalam negeri ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Berikut adalah beberapa bentuk ancaman internal terhadap Demokrasi Pancasila antara lain:

a. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan sistem pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri (Kenneth, 2024). Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik sering kali terjadi dalam bentuk praktik suap, nepotisme, serta penggelapan anggaran negara. Berikut merupakan contoh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Indonesia:

1. Kasus korupsi besar, seperti skandal PT Timah yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar senilai Rp 271 triliun, telah menimbulkan dampak serius berupa kerusakan lingkungan yang masif, kerugian ekonomi negara, serta beban besar bagi masyarakat dalam bentuk penurunan kualitas hidup, hilangnya sumber daya alam, dan meningkatnya biaya pemulihan lingkungan (KOMPAS.com, 2024).
2. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah yang memanipulasi kebijakan, melakukan praktik kolusi, dan menerapkan nepotisme demi menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta prinsip keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Penegertian kolusi merupakan tindakan dan sikap tidak jujur yang melibatkan kesepakatan terselubung saat membuat perjanjian, dengan tujuan memberikan uang atau kemudahan tertentu sebagai sarana memperlancar proses atau urusan tertentu (Aulia Rahmawati Putri et al., 2025), sedangkan Nepotisme merupakan perilaku yang mengistimewakan keluarga atau teman dekat, meskipun individu yang diberi keuntungan tersebut tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi yang memadai (Debora Natasya Moningga et al., 2025).
3. Praktik politik uang dalam pemilu, dimana praktik politik uang ini melibatkan tindakan suap atau pemberian hadiah kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka dalam memilih. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan pemilihan yang jujur serta adil. Politik uang biasanya dilakukan oleh calon legislatif atau tim sukses dengan cara membagikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, agar mereka terdorong untuk memilih pihak tertentu (Ragil et al., 2024).

b. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Di era digital saat ini, penyebaran berita palsu atau hoaks menjadi salah satu ancaman serius bagi demokrasi. Hoaks adalah informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan, dengan tujuan menutupi kebenaran melalui penyajian data yang tampak meyakinkan namun tidak dapat diverifikasi. Tindakan ini juga mencakup penyebaran pesan palsu secara masif untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya (Masni et al., 2024). Hoaks berpotensi menimbulkan kepanikan, kebingungan, hingga memicu konflik di kalangan masyarakat. Penyebaran informasi palsu ini juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, baik individu maupun dalam perumusan kebijakan public (Yopita Desriana Butar, 2024). Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik dapat dengan mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menerima informasi secara mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenaran yang valid, sehingga hal ini dapat memicu banyaknya asumsi negatif yang beredar. Akibatnya, kesalahpahaman terhadap suatu hal yang belum tentu benar adanya semakin meluas, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketegangan sosial, polarisasi di masyarakat, serta mengganggu stabilitas nasional. Berikut contoh penyebaran hoaks dan disinformasi yang ada di Indonesia:

1. Hoaks politik menjelang pemilu, di mana informasi palsu tentang kandidat tertentu disebarluaskan untuk menjatuhkan citranya. Hal ini menyebabkan masyarakat salah dalam menentukan pilihan politiknya.
2. Penyebaran isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang memecah belah persatuan bangsa. Misalnya, hoaks yang mengklaim bahwa kelompok tertentu mendapatkan perlakuan istimewa atau hendak menguasai pemerintahan.
3. Manipulasi media sosial oleh pihak tertentu untuk mengadu domba masyarakat dan memperkeruh suasana politik. Contohnya, akun-akun bot atau buzzer yang menyebarkan propaganda dengan tujuan menciptakan perpecahan sosial.

c. Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme adalah suatu ideologi atau gerakan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial dan politik melalui tindakan kekerasan atau cara-cara yang ekstrem (Abidin et al., 2024). Kelompok radikal memanfaatkan ketimpangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat untuk menyebarkan ideologi mereka. Sementara itu, intoleransi terjadi ketika suatu kelompok masyarakat tidak menerima keberagaman dan menolak perbedaan dalam aspek keyakinan, budaya, atau pandangan politik. Kedua ancaman ini dapat merusak persatuan bangsa serta menghambat demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan gotong royong, yang merupakan inti dari sistem Demokrasi Pancasila. Berikut beberapa contoh ancaman yang muncul di tengah masyarakat:

1. Radikalisasi Generasi Muda Melalui Media Sosial

Kemajuan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda mereka. Generasi muda menjadi sasaran utama karena masih dalam tahap pencarian jati diri dan sering kali kurang kritis dalam menyaring informasi. Melalui konten yang disajikan secara menarik, kelompok ini menyusupkan paham ekstrem dengan membangun narasi yang menyesatkan, seperti memanipulasi ajaran agama atau ideologi tertentu untuk membenarkan tindakan radikal. Bahkan, ada kasus di mana anak muda direkrut dan dilatih untuk melakukan aksi ekstrem dengan dalih memperjuangkan keyakinan mereka.

2. Intoleransi terhadap Perbedaan Keyakinan

Salah satu bentuk intoleransi yang sering terjadi adalah penolakan terhadap kelompok agama minoritas dalam menjalankan ibadah atau membangun tempat ibadah mereka. Beberapa kelompok masyarakat menolak keberadaan keyakinan yang berbeda, bahkan menggunakan tekanan sosial atau kekerasan untuk menghambat kebebasan beragama. Hal ini bertentangan dengan nilai kebhinekaan dan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 serta prinsip Demokrasi Pancasila yang mengutamakan keberagaman dan persatuan.

d. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah salah satu pondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan menegakkan prinsip Demokrasi Pancasila. Hukum seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu, memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus yang menunjukkan lemahnya sistem hukum di Indonesia. Ketika hukum hanya diterapkan secara tebang pilih, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan, yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan bangsa dan stabilitas sosial.

Lemahnya penegakan hukum tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga membuka peluang bagi kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Jika ketidakadilan dalam sistem peradilan terus dibiarkan, masyarakat dapat merasa frustrasi dan tidak lagi percaya pada jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya praktik main hakim sendiri, protes sosial yang berujung pada kerusuhan, serta pelemahan supremasi hukum di negara ini. Berikut adalah beberapa ancaman nyata yang muncul akibat lemahnya penegakan hukum:

1. Ketimpangan dalam Sistem Peradilan

Salah satu contoh paling nyata dari lemahnya hukum adalah ketimpangan dalam sistem peradilan. Tidak jarang terjadi kasus di mana seseorang dengan kekayaan atau jabatan tinggi dapat lolos dari hukuman atau hanya mendapatkan sanksi ringan, sementara rakyat kecil yang melakukan kesalahan serupa dijatuhi hukuman berat. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara sering kali berakhir dengan hukuman yang tidak setimpal dengan dampak kerugian yang mereka timbulkan bagi negara dan masyarakat. Sebaliknya, rakyat kecil yang terjerat kasus hukum, bahkan untuk pelanggaran kecil seperti pencurian karena alasan ekonomi, sering kali dijatuhi hukuman maksimal tanpa ada pertimbangan kemanusiaan. Rendahnya integritas aparat penegak hukum menimbulkan dampak yang serius terhadap sistem keadilan. Gejala ini tercermin dari kecenderungan keterlibatan dalam tindakan tidak etis maupun ilegal, seperti penerimaan suap dan rekayasa bukti. Kondisi tersebut merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memperkuat anggapan bahwa hukum hanya berpihak pada pihak yang memiliki kekuatan finansial atau jaringan kekuasaan (Aiman, 2024). Jika hukum terus berpihak pada kelompok yang berkuasa, maka masyarakat akan merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak mereka sebagai warga negara.

2. Kasus Besar yang Tidak terselesaikan atau Mengalami Intervensi Politik

Banyak kasus besar, terutama yang melibatkan korupsi, kejahatan lingkungan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sering kali tidak terselesaikan atau mengalami proses hukum yang berlarut-larut. Intervensi politik menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian kasus-kasus ini, di mana pihak-pihak yang memiliki kekuasaan berusaha melindungi diri mereka atau kelompoknya dari jeratan hukum.

Sebagai contoh, ada banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, tetapi proses hukumnya berjalan sangat lambat dan tidak transparan. Beberapa kasus bahkan menghilang dari pemberitaan seiring waktu tanpa adanya kejelasan penyelesaian. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Selain itu, dalam beberapa kasus, hukum justru digunakan sebagai alat untuk membungkam lawan politik atau kelompok yang berseberangan

dengan kepentingan tertentu. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya melindungi semua warga negara secara adil dan transparan.

3. Kriminalisasi terhadap Aktivis dan Jurnalis

Salah satu bentuk ancaman lain dari lemahnya penegakan hukum adalah kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis yang berani mengungkap kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Di beberapa kasus, mereka justru dijadikan target hukum dengan tuduhan yang dibuat-buat untuk membungkam suara kritis mereka. Misalnya, ada jurnalis yang menghadapi tuntutan hukum setelah mengungkap kasus korupsi atau pelanggaran lingkungan yang melibatkan perusahaan besar atau pejabat tinggi. Begitu pula dengan aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil atau lingkungan hidup, sering kali mendapatkan tekanan dari aparat atau pihak berwenang yang merasa kepentingannya terganggu.

Fenomena ini tidak hanya mengancam kebebasan pers dan kebebasan berbicara, tetapi juga merusak demokrasi. Jika mereka yang berusaha menegakkan kebenaran justru dikriminalisasi, maka tidak ada lagi kontrol sosial yang bisa menjaga transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat pun semakin takut untuk menyuarakan pendapatnya, yang pada akhirnya membuat ruang demokrasi semakin sempit.

e. Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik adalah elemen fundamental dalam sistem demokrasi karena menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi, baik melalui pemilu maupun pengawasan kebijakan, maka pemerintahan yang terbentuk lebih mencerminkan kehendak rakyat. Namun, kenyataannya, masih banyak warga yang apatis terhadap politik dan enggan menggunakan hak pilihnya. Sikap ini dapat melemahkan demokrasi karena hanya sebagian kecil rakyat yang menentukan jalannya pemerintahan, sementara kelompok mayoritas tetap pasif tanpa berkontribusi terhadap perubahan.

Rendahnya partisipasi politik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik, kurangnya pendidikan politik, atau kekecewaan terhadap para pemimpin yang dianggap tidak mampu mewakili kepentingan rakyat. Akibatnya, keputusan penting dalam pemerintahan sering kali diambil tanpa adanya keterlibatan luas dari masyarakat. Beberapa ancaman nyata yang muncul akibat rendahnya partisipasi politik meliputi:

1. Tingkat Golput yang Tinggi dalam Pemilu

Salah satu bentuk rendahnya partisipasi politik adalah tingginya angka golongan putih (golput) dalam pemilu. Banyak warga enggan memilih karena merasa tidak ada calon yang benar-benar mewakili aspirasi mereka atau karena ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang dianggap korup dan tidak berpihak kepada rakyat. Jika tren ini terus berlanjut, maka pemimpin yang terpilih tidak akan mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, sehingga demokrasi menjadi lemah dan mudah dimanipulasi oleh kelompok tertentu.

2. Minimnya Keterlibatan Generasi Muda dalam Politik

Generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa, tetapi keterlibatan mereka dalam politik masih sangat rendah. Banyak anak muda merasa politik adalah sesuatu yang kotor atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Padahal, tanpa keterlibatan aktif mereka, sulit bagi Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang visioner, inovatif, dan berintegritas. Meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dalam membangun pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

3. Kurangnya Kontrol Sosial terhadap Kebijakan Pemerintah

Selain pemilu, partisipasi politik juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat tidak aktif mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pemerintah cenderung lebih mudah mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kurangnya kontrol sosial ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, serta kebijakan yang tidak transparan.

2. Faktor Eksternal (Ancaman dari Luar Negeri)

Dalam era globalisasi, ancaman terhadap suatu negara tidak hanya berasal dari dalam, tetapi juga dari luar negeri. Ancaman eksternal ini dapat berupa intervensi politik, pengaruh ekonomi yang tidak sehat, hingga potensi konflik di perbatasan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ancaman-ancaman ini dapat melemahkan kedaulatan dan stabilitas nasional. Beberapa ancaman nyata dari luar negeri yang dapat mempengaruhi Indonesia meliputi:

- a. **Intervensi Politik dan Propaganda Asing**
Negara-negara besar sering kali menggunakan pengaruh politiknya untuk memengaruhi kebijakan dalam negeri suatu negara demi kepentingan mereka sendiri. Ini bisa terjadi melalui diplomasi tekanan, pendanaan kelompok tertentu, atau penyebaran propaganda yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Jika Indonesia tidak memiliki ketahanan politik yang kuat, maka intervensi asing ini dapat mengancam kemandirian dalam pengambilan keputusan nasional.
- b. **Ketergantungan Ekonomi pada Negara Asing**
Globalisasi ekonomi membuat banyak negara, termasuk Indonesia, terlibat dalam perdagangan dan investasi internasional. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada negara lain, terutama dalam sektor strategis seperti energi, pangan, dan teknologi, dapat menjadi ancaman. Jika suatu negara asing memiliki kendali besar atas sektor-sektor ini, maka Indonesia bisa mengalami kesulitan dalam menjaga kemandirian ekonominya.
- c. **Sengketa Wilayah dan Keamanan Maritim**
Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang luas, baik di darat maupun laut. Sengketa perbatasan, khususnya di wilayah perairan, dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Beberapa negara asing terkadang melakukan pelanggaran wilayah, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) atau klaim sepihak terhadap wilayah Indonesia. Jika tidak ditangani dengan tegas, hal ini dapat melemahkan posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatannya.

B. Upaya Mempertahankan Demokrasi Pancasila

Untuk menjaga keberlangsungan Demokrasi Pancasila, diperlukan berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, serta memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Demokrasi Pancasila:

1. **Meningkatkan Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi**
Pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Dengan adanya edukasi yang memadai, masyarakat akan lebih aktif dalam berpartisipasi politik, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu dan mengawasi kebijakan pemerintah.
2. **Menegakkan Supremasi Hukum yang Adil dan Transparan**
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Reformasi dalam sistem peradilan diperlukan agar hukum tidak dapat diintervensi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
3. **Menangkal Radikalisme dan Intoleransi**
Upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi perlu dilakukan melalui pendekatan pendidikan, budaya, dan sosial. Pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat harus bersama-sama menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi agar persatuan bangsa tetap terjaga.
4. **Memperkuat Kedaulatan Nasional dari Intervensi Asing**
Indonesia harus menjaga kemandirian dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, dan pertahanan. Mengurangi ketergantungan terhadap negara asing dalam sektor strategis akan membantu menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
5. **Mengawasi dan Mengatasi Penyebaran Hoaks serta Serangan Siber**
Dalam era digital, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu (hoaks) yang dapat memecah belah bangsa. Pemerintah juga harus memperkuat sistem keamanan siber guna melindungi data negara dari ancaman eksternal.

6. Meningkatkan Peran Generasi Muda dalam Demokrasi

Kaum muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, mereka harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan, baik melalui organisasi, diskusi publik, maupun kebijakan yang mendorong partisipasi generasi muda.

Dengan menerapkan berbagai upaya ini, Demokrasi Pancasila dapat tetap tegak dan berfungsi sebagai sistem yang menjamin kebebasan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan Demokrasi Pancasila di Indonesia tengah menghadapi tekanan serius dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal. Dari dalam negeri, sejumlah faktor seperti maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, praktik kolusi dan nepotisme, penyebaran hoaks dan disinformasi, radikalisme, intoleransi, lemahnya supremasi hukum, serta rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi ancaman utama yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Sementara itu, pengaruh eksternal berupa intervensi politik asing, ketergantungan ekonomi terhadap negara lain, serta konflik wilayah turut menantang kedaulatan dan stabilitas nasional. Keseluruhan ancaman ini, jika tidak diantisipasi secara serius, berpotensi merusak nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia dan menghambat terwujudnya kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Dari hasil penelitian ini untuk memperkuat ketahanan Demokrasi Pancasila, diperlukan strategi menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Pemerintah harus melakukan reformasi hukum yang komprehensif guna menjamin keadilan tanpa diskriminasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Literasi politik dan digital harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal, khususnya untuk mendorong peran aktif generasi muda dalam proses demokrasi. Pencegahan radikalisme dan intoleransi perlu dilakukan dengan pendekatan kultural, edukatif, dan kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan institusi keagamaan. Di samping itu, penguatan kedaulatan nasional melalui kebijakan ekonomi yang mandiri, ketahanan informasi, serta pengawasan ketat terhadap isu-isu strategis seperti keamanan perbatasan dan pengaruh asing, menjadi hal mendesak guna menjaga integritas demokrasi Indonesia ke depan.

References

- Abidin, W., Akbar Pangestu, S., & Ayu Sekar Pawening, D. (2024). PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TERORISME MELALUI KERANGKA KONTRA RADIKALISME BAGI PELAJAR SMA MALANG PREVENTION OF RADICALISM AND TERRORISM THROUGH A COUNTER-RADICALISM FRAMEWORK FOR HIGH SCHOOL STUDENTS MALANG. *WISESA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Aulia Rahmawati Putri, D., Khaerunisa, D., Islahani Rehita, J., Miftahul Awali, R., & Farrel Aryo Rafasya, M. (2025). KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA. *MORALITA: JURNAL PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*.
- Debora Natasya Moningka, B., O. Setiabudhi, D., & A. Rumokoy, D. (2025). KAJIAN HUKUM NEPOTISME PADA PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI PEMERINTAHAN. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14 No. 5.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *Nathanael Kenneth*, Vol. 2 No. 1(1).
- KOMPAS.com. (2024, April 17). *Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA*. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Masni, Asriadi, M., Asriati, & Hasyim, Q. (2024). Pelatihan Literasi Media Sosial Bagi Pemilih Pemula Tentang Hoax, Hate Speech dan Negative Campaign. *VOKATEK*, Vol. 2 No. 2.
- Maulana Siregar, W., Ayu, D., Permata Sari Rambe, I., Tanjung, P., Khaitami, R., & Fadillah, S. (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara MEMBANGUN DEMOKRASI INDONESIA YANG BERLANDASKAN PANCASILA DI ERA DIGITAL BUILDING INDONESIAN DEMOCRACY BASED ON PANCASILA IN THE DIGITAL ERA. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Ragil, R., Qayyum, H. I., Bahari, H., & Haskar, E. (2024). Efektifitas Program KALIBER Sebagai Upaya Edukasi dan Preventif Bahaya Praktek Politik Uang Menjelang Pemilu 2024. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 66–77. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8768>
- Yopita Desriana Butar. (2024). Analisis Penyebaran Hoax Di Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(2), 252–258. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3201>